

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berusaha dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat (Yunan, 2009:2). Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Faktor penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah pembentukan investasi. Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Di samping itu pola konsumsi masyarakat juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasan yang pertama, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang

kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara bersangkutan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan. Di lain pihak jika tabungan semua orang di suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional yang merupakan sumber dana investasi. Sehingga dalam jangka panjang pola konsumsi dan tabungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukirno. 2000).

Menurut Suryamin sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), untuk keseluruhan Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,02 persen pada 2014 menjadi 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 56,64 persen dan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB datang dari investasi atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dengan andil terhadap PDB sebesar 34,97 persen. Hal ini menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain karena

kontribusinya dalam PDB yang sangat dominan, pertumbuhannya pun masih di atas investasi dan ekspor.

Peningkatan konsumsi rumah tangga salah satunya disebabkan oleh konsumsi bukan makanan yang umumnya berasal dari peningkatan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Kepemilikan Mobil), dan kartu kredit yang terus mengalami peningkatan yang sebagian besar didorong oleh kredit konsumsi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muliawan (2004) yang menyatakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan konsumsi adalah kredit untuk tujuan konsumsi yang cenderung meningkat dalam periode yang sama.

Kredit konsumsi merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya (Kasmir, 2014:91).

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kredit konsumsi yang disalurkan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2014 total kredit konsumsi yang disalurkan oleh 43 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 673,933,136 juta. Sedangkan Tahun 2015 penyaluran kredit konsumsi sebesar Rp 728,881,286 juta dengan selisih kenaikan dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar Rp

54,948,150 juta atau tumbuh sebesar 8.15 persen dan rata-rata penyaluran kredit konsumsi di Tahun 2015 sebesar Rp 16,950,727.58 juta.

**Tabel 1.1**  
**Bank Dengan Penyaluran Kredit Konsumsi Di Atas Rata-Rata**  
**Di Tahun 2014 - 2015**

No	Nama Bank	2015	Persentase	2014	Persentase
1	Mandiri	114,075,601	15.6 %	108,902,197	16.1 %
2	BTN	109,132,930	14.9 %	90,527,465	13.4 %
3	BCA	91,026,938	12.5 %	83,504,549	12.4 %
4	BRI	89,621,859	12.3 %	82,118,614	12.2 %
5	BNI	64,190,531	8.8 %	57,525,989	8.5 %
6	BJB	42,614,244	5.8 %	35,954,112	5.3 %
7	CIMB	37,911,297	5.2 %	35,710,496	5.29 %
8	Maybank	33,632,789	4.6 %	30,799,296	4.6 %
9	Panin	21,891,289	3.0 %	23,387,310	3.5 %
10	Permata	21,541,702	2.9 %	23,100,140	3.4 %
11	Danamon	20,441,278	2.8 %	30,434,664	4.5 %
12	Bank Jatim	18,054,658	2.5 %	16,745,668	2.5%

Sumber : Bursa Efek Indonesia, diolah

Dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Tahun 2014 - 2015 terdapat 12 bank dengan penyaluran kredit konsumsi di atas rata-rata, yang dikelompokkan berdasarkan penguasaan saham. Dengan urutan lima besar bank penyalur kredit konsumsi yaitu Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Sedangkan bank penyalur kredit konsumsi paling rendah yaitu Bank Jawa Timur. Dari lima besar bank penyalur kredit konsumsi tersebut diantaranya merupakan bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah.

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Kredit Konsumsi pada Bank yang Mayoritas Sahamnya**  
**Milik Pemerintah di Tahun 2014 - 2015**

No	Nama Bank	2015	Persentase	2014	Persentase
1	Mandiri	114,075,601	15.6 %	108,902,197	16.1 %
2	BTN	109,132,930	14.9 %	90,527,465	13.4 %
3	BRI	89,621,859	12.3 %	82,118,614	12.2 %
4	BNI	64,190,531	8.8 %	57,525,989	8.5%
<b>Total</b>		<b>377,020,921</b>	<b>51.6 %</b>	<b>339,074,265</b>	<b>50.8 %</b>

Sumber : Bursa Efek Indonesia, diolah

Berdasarkan data di atas setelah mengalami pengolahan, bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia menyalurkan kredit konsumsi di Tahun 2015 sebesar 51.6 persen dari total kredit konsumsi yang disalurkan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan jumlah kredit konsumsi yang disalurkan di Tahun 2015 sebanyak Rp 377,020,921 juta atau tumbuh 11.20 persen dari Tahun 2014 yang sebesar Rp 339,074,265 juta. Pertumbuhan tersebut jauh diatas pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan yang tercatat sebesar 8.15 persen. Hal ini menunjukkan jumlah penyaluran kredit konsumsi bank umum didominasi oleh bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah. Maka dari itu untuk mengetahui penyaluran kredit konsumsi bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini mengambil kasus pada bank yang mayoritasnya sahamnya milik pemerintah periode 2007-2015.

Meskipun secara nominal jumlah kredit konsumsi yang disalurkan mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari perkembangan jumlah kredit konsumsi yang disalurkan mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari

dampak masa krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008, bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Amerika Serikat diawali karena adanya dorongan untuk konsumsi (*Propensity to Consume*). Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan – perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi tak berdaya, perusahaan-perusahaan besar tak sanggup bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs.

Pada saat itu, Amerika Serikat mengalami resesi yang serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Amerika berdampak pada penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian ekspor Indonesia pun menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI mencatatkan defisit sebesar US\$ 2,2 miliar pada tahun 2008. Penyebab lain

terjadinya defisit NPI adalah derasnya aliran keluar modal asing dari Indonesia khususnya pada pasar SUN (Surat Utang Negara) dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Derasnya aliran modal keluar tersebut mengakibatkan investasi portofolio mencatat defisit sejak kuartal III-2008 dan terus meningkat pada kuartal IV-2008. Selain itu, adanya sentimen negatif terhadap pasar keuangan global juga membuat terjadinya pelepasan aset finansial oleh investor asing dan membuat neraca finansial dan modal ikut menjadi defisit.

Krisis ekonomi global juga berdampak pada keketatan likuiditas global, dengan demikian *supply* dollar relatif sangat menurun. Hal inilah yang memberikan efek depresiasi terhadap Rupiah. Keketatan likuiditas global terjadi akibat perusahaan dan rumah tangga lebih menjaga likuiditasnya untuk berjaga-jaga dari berbagai resiko bisnis yang meningkat akibat krisis global. Hal ini yang mengakibatkan sulitnya mencari dana talangan dalam membiayai defisit anggaran pemerintah. Rumah tangga konsumen pun mulai menahan diri untuk berbelanja guna mengantisipasi terhadap guncangan yang mungkin terjadi. Keketatan likuiditas diperparah oleh sikap bank yang terlalu berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya dalam rangka meminimalisir terjadinya kredit macet.

Selanjutnya krisis ekonomi global juga berdampak pada kenaikan harga komoditas internasional seperti minyak dan pangan. Hal tersebut mendorong dikeluarkannya kebijakan subsidi harga BBM di Indonesia yang disertai dengan tingginya permintaan domestik. Sehingga tekanan inflasi makin tinggi. Untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi, BI menaikkan BI *rate* dari 8 persen secara bertahap menjadi 9,5 persen pada Oktober 2008. Maka dari itu, krisis

ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan di Tahun 2008. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.1 persen melambat dari Tahun 2007 yang mencapai 6.3 persen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi dari sisi internal bank. Faktor pertama yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi pada perbankan adalah dari sisi penerimaan yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Penghimpunan dana oleh pihak bank merupakan kegiatan operasional dalam memperoleh dana dari masyarakat yang nantinya digunakan sebagai penyediaan dana untuk keperluan penyaluran kredit. Menurut Siamat dalam Dendawijaya (2009), penghimpunan dana yang meliputi tabungan, deposito dan giro merupakan sumber dana bagi bank dan memiliki peranan yang penting terhadap besarnya kredit yang disalurkan. Semakin besar penghimpunan dana oleh pihak bank maka semakin besar jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank yang Mayoritas Sahamnya**  
**Milik Pemerintah Tahun 2013-2015**

Nama Bank	Tahun	Kredit Konsumsi (Juta Rp)	Giro (Juta Rp)	Tabungan (Juta Rp)	Deposito (Juta Rp)
<b>Mandiri</b>	2013	94,732,645	123,427,649	216,017,610	169,550,997
<b>Mandiri</b>	2014	108,902,197	128,053,558	231,461,256	223,934,097
<b>Mandiri</b>	2015	114,075,601	172,154,488	248,951,639	201,226,204
<b>BTN</b>	2013	77,202,841	19,116,196	24,237,893	52,853,533
<b>BTN</b>	2014	90,527,465	23,442,618	26,167,914	56,880,145
<b>BTN</b>	2015	109,132,930	31,368,443	30,757,681	65,582,546
<b>BRI</b>	2013	74,649,615	78,666,064	210,234,683	201,585,766
<b>BRI</b>	2014	82,118,614	89,430,267	232,722,519	283,457,544
<b>BRI</b>	2015	89,621,859	113,429,343	268,058,865	267,884,404
<b>BNI</b>	2013	51,732,092	88,183,377	111,799,634	126,845,830
<b>BNI</b>	2014	57,525,989	82,743,186	114,969,594	102,552,029
<b>BNI</b>	2015	64,190,531	90,763,359	129,364,312	133,809,209

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Dari tabel 1.3 bahwa kredit konsumsi yang disalurkan bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah pada Tahun 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan demikian juga penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito pada Tahun 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan, kecuali untuk deposito pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia di Tahun 2015 mengalami penurunan dan pada Bank Negara Indonesia di Tahun 2014 untuk giro dan deposito, sementara kredit konsumsi yang disalurkan mengalami peningkatan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Siamat dalam Dendawijaya (2009), seharusnya dalam kondisi dana yang dihimpun menurun kredit konsumsi yang disalurkan pun akan ikut menurun. Jika kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank mengalami peningkatan disaat dana yang dihimpun mengalami penurunan, maka yang terjadi pada perbankan adalah adanya resiko likuiditas atau resiko yang mungkin

dihadapi oleh bank ketika bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo karena pada saat yang bersamaan pihak bank tidak memiliki sumber dana lain untuk memenuhi kewajibannya.

Hal lain yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi adalah tingkat kecukupan modal perbankan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menyatakan bahwa setiap bank menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko yang diprosikan dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Modal merupakan suatu faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk juga bagi bank. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko kredit macet yang timbul.

Menurut Dendawijaya (2005), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Warjiyo (2006) yang

menyatakan kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit perbankan.

**Tabel 1.4**  
**Rasio CAR dan NPL pada Bank yang Mayoritas Sahamnya Milik**  
**Pemerintah Tahun 2013-2015**

Nama Bank	Tahun	Kredit Konsumsi (Juta Rp)	CAR (%)	NPL (%)
Mandiri	2013	94,732,645	14,93	1,60
Mandiri	2014	108,902,197	16,60	1,66
Mandiri	2015	114,075,601	18,60	2,29
BTN	2013	77,202,841	15,62	4,05
BTN	2014	90,527,465	14,64	4,01
BTN	2015	109,132,930	16,97	3,42
BRI	2013	74,649,615	16,99	1,55
BRI	2014	82,118,614	18,31	1,69
BRI	2015	89,6218,59	20,59	2,02
BNI	2013	51,732,092	15,10	2,17
BNI	2014	57,525,989	16,20	1,96
BNI	2015	64,190,531	19,50	2,67

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Dalam tabel 1.4 bahwa kredit konsumsi yang disalurkan bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah pada Tahun 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan demikian juga rasio CAR pada Tahun 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan, kecuali rasio CAR pada Bank Tabungan Negara di Tahun 2014 mengalami penurunan. Sementara kredit konsumsi yang disalurkan mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan pengalokasian dana yang tidak efisien dan berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2005) dan Warjiyo (2006), seharusnya jika rasio CAR yang dimiliki mengalami penurunan jumlah maka bank harus mengurangi penyaluran kredit, karena bank akan menghadapi resiko dalam membiayai kredit dan menghambat kegiatan operasional bank.

Dalam pengambilan keputusan penyaluran kredit, bank harus berhati-hati karena setiap keputusan penyaluran dana berupa kredit selalu diikuti dengan resiko yang mungkin timbul (Ismail, 2010 : 121). Resiko dimaksud adalah kemungkinan tidak lancarnya pengembalian pinjaman yang lebih dikenal dengan resiko kredit berupa kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (Surata, 2011:59). Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektabilitasnya yang merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh Bank. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL (*Non Performing Loan*) yang wajar berkisar antara 3-5 persen dari total portofolio kreditnya.

*Non Performing Loan* merupakan faktor selanjutnya yang terkadang menjadi masalah yang sering terjadi dalam perbankan yaitu bukan hanya bagaimana pihak bank menyalurkan kredit tersebut tetapi bagaimana kredit tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena suatu bank dikatakan sehat apabila penyaluran dan pengembalian kredit dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank. Maka dari itu bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi NPL yang tinggi (Meydianawathi, 2007). Menurut Soedarto (2004) semakin besar kredit non

lancar maka jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

Dari tabel 1.4 bahwa kredit konsumsi yang disalurkan bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah pada Tahun 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan demikian juga rasio NPL pada masing-masing bank mengalami peningkatan. Dengan rasio NPL paling besar yaitu pada Bank Tabungan Negara, meskipun demikian kinerja Bank Tabungan Negara memperlihatkan kondisi yang membaik terlihat dari rasio NPL yang semakin menurun. Sementara pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia pada Tahun 2014-2015 menunjukkan adanya peningkatan dan pada Bank Negara Indonesia terjadi peningkatan di Tahun 2015. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan Soedarto (2004), karena dengan rasio NPL yang tinggi akan membuat persediaan kas bank menurun seiring penambahan nasabah yang mengalami kredit bermasalah, sedikitnya modal bank akan membuat bank sulit menyalurkan pinjaman. Ketika bank tersebut menyalurkan kredit dengan tingkat NPL yang tinggi maka resiko yang dipikul oleh bank-bank tersebut terbilang tinggi sehingga keberlangsungan bank bisa terancam karena laba perusahaan akan mengalami penurunan. Seharusnya bank menekan penyaluran kredit dan memilih mengoptimalkan *funding* atau menghimpun dana serta menjaga likuiditas perusahaan agar nasabah tetap memiliki kepercayaan terhadap kinerja perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2015 Studi Kasus Bank Yang Mayoritas Sahamnya Milik Pemerintah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh giro, tabungan, deposito, CAR, dan NPL terhadap penyaluran kredit konsumsi pada bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah periode 2007-2015 baik secara parsial maupun simultan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh giro, tabungan, deposito, CAR, dan NPL terhadap penyaluran kredit konsumsi pada bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah periode 2007-2015 baik secara parsial maupun simultan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis**

Searah dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi pada bank umum yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2015 pada bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
2. Sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2015 pada bank mayoritas sahamnya milik pemerintah.
4. Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan pada penyaluran kredit konsumsi bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2015 pada bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah.